

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh

Salman<sup>1\*</sup>, Rasyidin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra  
Jln. Meurandeh, Kota Langsa, Aceh, 24415  
*email: salman@unsam.ac.id*

### ABSTRAK

*Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Data yang digunakan adalah data pengeluaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta indeks pembangunan manusia dari tahun 2007-2017. Metode analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil persamaan regresi linier berganda diperoleh  $Y = 66,9530 + 23,50261X_1 + 43,22175X_2$ . Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,576 atau sebesar 57,6% variabel pengeluaran sektor pendidikan dan variabel pengeluaran sektor kesehatan memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil uji t variabel pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil uji F secara simultan pengeluaran sektor pendidikan dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh.*

**Kata kunci :** Indeks Pembangunan Manusia; Kesehatan; Pendidikan

### ABSTRACT

*The study was conducted with the aim to determine the effect of education and health sector spending on the human development index. The data used are education and health sector expenditure data and the human development index from 2007-2017. Methods of data analysis using multiple linear regression equations. The results of multiple linear regression equations obtained  $Y = 66,9530 + 23,50261X_1 + 43,22175 X_2$ . The results of the determination coefficient test of 0,576 or 57,6% of the education sector expenditure variables and the health sector expenditure variables have an influence on the human development index. T-test results of education and health sector expenditure variables significantly influence the human development index. The simultaneous F test results in education sector expenditure and health sector expenditure have a significant effect on the human development index in Aceh Province.*

**Keywords :** Education; Health; Human Development Index

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara, hal tersebut sesuai dengan tujuan bangsa yang tertuang

dalam UUD 1945. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator yang sangat mendasar yaitu kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa daya beli masyarakat.

Salah satu peran pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia adalah dengan peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyata peran pemerintah yaitu melalui kewenangan dalam hal pengelolaan fiskal. diantara berbagai kebijakan fiskal tersebut ada kebijakan dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pengeluaran untuk sektor publik seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pengeluaran dibidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup serta mampu menurunkan angka kematian. Kemudian anggaran dibidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah sehingga dapat meningkatkan angka harapan sekolah.

**Tabel 1. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017**

Tahun	Pengeluaran Pendidikan (Rp)	Pengeluaran Kesehatan (Rp)	IPM Aceh (%)
2012	906.936.470.203	895.106.316.693	67,81
2013	638.365.255.079	886.579.488.476	68,30
2014	1.272.861.924.638	1.090.269.775.225	68,81
2015	47.816.206.026	172.751.501.826	69,45
2016	976.215.065.708	1.441.274.499.220	70,00
2017	2.723.287.709.045	1.811.622.160.009	70,60

Sumber: <http://bpka.acehprov.go.id>, (2018)

Berdasarkan Tabel 1. dapat terlihat pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan mengalami fluktuasi. Seperti yang terlihat pengeluaran di sektor pendidikan pada tahun 2012 sebesar Rp 906.936.470.203 kemudian turun menjadi Rp 638.365.255.079 tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp 1.272.861.924.638, peningkatan yang pesat pada tahun ini dikarenakan pemerintah pusat menganggarkan pengeluaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sehingga daerah juga meningkatkan pengeluaran dibidang pendidikan. Akan tetapi kembali turun menjadi sebesar Rp 47.816.206.026 pada tahun 2015 penurunan ini juga dikarenakan penurunan anggaran pendidikan pada pemerintah pusat sehingga berimbas pada pengeluaran pendidikan di daerah. Pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 976.215.065.708 kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjai sebesar Rp 2.723.287.709.045.

Pengeluaran kesehatan juga mengalami fluktuasi. Namun penurunan yang sangat besar terjadi pada tahun 2015 menjadi hanya sebesar Rp 172.751.501.826. Penurunan pengeluaran dibidang kesehatan pada tahun 2015 dikarenakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada pengeluaran kesehatan di daerah. Kemudian pada tahun 2016 kembali ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.441.274.499.220 demikian pada tahun 2017 pengeluaran kesehatan meningkat lagi menjadi Rp 1.811.622.160.009.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Aceh tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Anggaran pengeluaran bidang Pendidikan dan kesehatan mengalami fluktuasi, pada tahun 2012, Anggaran pendidikan Rp 906.936.470.203, Anggaran kesehatan Rp 895.106.316.693 dengan indeks pembangunan manusia 67,81. Tahun 2013 Anggaran pendidikan Rp 638.365.255.079, Anggaran kesehatan Rp 886.579.488.476 dengan indeks pembangunan manusia 68,30.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh? Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan baik secara parsial maupun simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh.

Pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat, 2010). Menurut Dumairy (2000) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah menunjukkan peran ekonomi dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera terdiri dari 4 peran yaitu: peran alokasi, peran distributif, peran stabilitatif, dan peran dinamisatif.

Saat ini pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk bidang pendidikan. Kebijakan ini tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Hal ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi perkembangan zaman. Sebab kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya.

Undang – undang di Indonesia juga mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU

No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Feriyanto (2014) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Selanjutnya dalam *Website* bps.go.id, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara tersebut adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Priambodo (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia yang diwujudkan melalui peningkatan daya beli akan mendorong permintaan produk kebutuhan rumah tangga lokal secara menyeluruh. Meningkatnya permintaan barang produk local akan memberikan rangsangan yang besar kepada produsen lokal, memperbesar kesempatan kerja, dan menumbuhkan investasi. Kemudian struktur belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik itu dari belanja modal, belanja pegawai, dan belanja daerah direalisasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik, dimana dari komponen belanja daerah tersebut terdapat salah satu faktor pembentuk indeks pembangunan manusia yang tentunya akan meningkatkan pencapaian indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia juga disebutkan Ginting (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu determinan indeks pembangunan manusia. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah pemerintah harus semakin mendekati diri pada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peran penting guna meningkatkan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh, dan (2) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2007-2017.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini berupa kutipan dari buku-buku dan jurnal penelitian. Sedangkan data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari BPS. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari *website* BPS Aceh dan Badan Pengelola Keuangan Aceh.

Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan isi tulisan ini, dan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara dengan menelaah dokumen yang disajikan oleh BPS. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia menggunakan model ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \quad (1)$$

Dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

$\alpha$  = Intercept/Konstanta

X<sub>1</sub> = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

X<sub>2</sub> = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

Uji secara Parsial/Individual (Uji t) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individual) menerangkan variasi variabel dependen.

Bentuk pengujiannya:

H<sub>0</sub>: b=0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

H<sub>a</sub>: b≠0, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

H<sub>0</sub> diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

H<sub>a</sub> diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Sedangkan uji secara simultan /bersama-sama (Uji F) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) menerangkan variasi variabel dependen. Bentuk pengujiannya:

H<sub>0</sub>: b=0, artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a: b \neq 0$ , artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

$H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

$H_a$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Selanjutnya, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ), dimana semakin tinggi  $R^2$  (mendekati 1) berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas dan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat dan apabila  $R^2 = 0$  menunjukkan variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari BPS, fasilitas pendidikan yang terdapat di 18 Kabupaten dan 5 Kota di Aceh, dengan total sekolah Taman Kanak-Kanak di Provinsi Aceh berjumlah 2,212 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota. Kabupaten Aceh Utara merupakan Kabupaten yang memiliki paling banyak jumlah TK yaitu sebanyak 241 unit.

Begitupun halnya dengan Sekolah Dasar/Sederajat yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2017 sebanyak 4.068 unit. Kabupaten Aceh Utara memiliki SD/Sederajat terbanyak sebanyak 409 unit, kemudian disusul dengan Kecamatan Pidie sebanyak 337 unit serta Kabupaten/Kota yang memiliki SD/Sederajat paling sedikit adalah Kota Sabang. Sedangkan untuk SMP/Sederajat yang ada di Provinsi Aceh sebanyak 1.471 unit. Di Provinsi Aceh jumlah SMA/Sederajat sebanyak 977 unit. Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang memiliki jumlah SMA/Sederajat terbanyak diantara kecamatan lainnya yaitu sebesar 101 unit dan Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang memiliki jumlah SMA paling sedikit sebanyak 20 unit.

Sedangkan, pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dan dapat terlihat pada Tabel 2. berikut ini.

**Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh 2007-2017**

No	Tahun	Pengeluaran Pendidikan (Rp)	Perkembangan (%)
1	2007	249.177.943.032	-
2	2008	330.986.860.442	32,83
3	2009	1.535.251.735.193	363,84
4	2010	922.635.119.736	-39,90
5	2011	962.257.942.805	4,29
6	2012	906.936.470.203	-5,75
7	2013	638.365.255.079	-29,61
8	2014	1.272.861.924.638	99,39
9	2015	47.816.206.026	-96,24
10	2016	976.215.065.708	1941,60
11	2017	2.723.287.709.045	178,96

Sumber: BPKA Provinsi Aceh, 2018

Pada Tabel 2. memperlihatkan jumlah pengeluaran dan perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2007 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh sebesar Rp 249.177.943.032, kemudian pada tahun 2008 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 330.986.860.442 atau bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sekitar pendidikan tahun 2008 adalah sebesar 32,83%.

Selanjutnya pada tahun 2009 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2008 menjadi sebesar Rp 1.535.251.735.193 atau bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sekitar pendidikan tahun 2008 adalah sebesar 363,84%, kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat melalui menteri pendidikan perlunya alokasi belanja untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Aceh.

Pada tahun 2010 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2009 menjadi sebesar Rp 922.635.119.736 atau bila dipersentasekan maka penurunan pengeluaran sekitar pendidikan tahun 2010 adalah sebesar minus 39,90%. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam penambahan alokasi pengeluaran bidang kesehatan.

Pada tahun 2011 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2010 menjadi sebesar Rp 962.257.942.805 atau bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sekitar pendidikan tahun 2011 adalah sebesar 4,29%. Tahun 2012

jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2011 menjadi sebesar Rp 906.936.470.203 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sektor pendidikan tahun 2011 adalah sebesar minus 5,75%.

Pada tahun 2013 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2012 menjadi sebesar Rp 638.365.255.079 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sektor pendidikan tahun 2013 adalah sebesar minus 29,61%. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan ke sektor kesehatan. Selanjutnya, tahun 2014 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.272.861.924.638 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sektor pendidikan tahun 2013 adalah sebesar 99,39%.

Pada tahun 2015 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2014 menjadi sebesar Rp 47.816.206.026 atau bila dipersentasekan maka pengeluaran akan mengalami penurunan disektor pendidikan tahun 2015 adalah sebesar minus 96,24%. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari kementerian untuk mengurangi pengeluaran disektor pendidikan dan mengutamakan sektor lainnya. Selanjutnya, tahun 2016 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami kenaikan menjadi Rp 976.215.065.708 serta untuk tahun 2017 jumlah pengeluaran sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami kenaikan menjadi Rp 2.723.287.709.045 atau 178,96%.

Selanjutnya, dalam pengeluaran sektor kesehatan di Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dan dapat dilihat pada Tabel 3. berikut:

**Tabel 3. Perkembangan Pengeluaran Sektor Kesehatan di Provinsi Aceh 2007-2017**

No	Tahun	Pengeluaran Kesehatan (Rp)	Perkembangan (%)
1	2007	80.613.958.156	-
2	2008	289.601.553.998	259,24
3	2009	563.486.224.333	94,57
4	2010	664.091.777.513	17,85
5	2011	798.871.418.636	20,30
6	2012	895.106.316.693	12,05
7	2013	886.579.488.476	-0,95
8	2014	1.090.269.775.225	22,97
9	2015	172.751.501.826	-84,16
10	2016	1.441.274.499.220	734,31
11	2017	1.811.622.160.009	25,70

Sumber: BPKA Provinsi Aceh, 2018



Pada Tabel 3. memperlihatkan jumlah pengeluaran dan perkembangan di sektor kesehatan di Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2007 jumlah pengeluaran disektor kesehatan di Provinsi Aceh sebesar Rp 80.613.958.156, kemudian pada tahun 2008 jumlah pengeluaran di sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 289.601.553.998 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran disektor kesehatan tahun 2008 adalah sebesar 259,24%.

Selanjutnya pada tahun 2009 jumlah pengeluaran di sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2008 menjadi sebesar Rp 563.486.224.333 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran disektor kesehatan tahun 2008 adalah sebesar 94,57%, kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat melalui menteri kesehatan perlunya alokasi belanja untuk peningkatan mutu kesehatan di Provinsi Aceh.

Pada tahun 2010 jumlah pengeluaran di sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2009 menjadi sebesar Rp 664.091.777.513 bila dipersentasekan maka peningkatan pengeluaran di sektor kesehatan tahun 2010 adalah sebesar 17,85%. Pada tahun 2011 jumlah pengeluaran sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2010 menjadi sebesar Rp 798.871.418.636 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran disektor kesehatan tahun 2011 adalah sebesar 20,30%.

Tahun 2012 jumlah pengeluaran di sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2011 menjadi sebesar Rp 895.106.316.693 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran di sektor kesehatan tahun 2011 adalah sebesar 12,05%. Pada tahun 2013 jumlah pengeluaran sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2012 menjadi sebesar Rp 886.579.488.476 bila dipersentasekan maka penurunan pengeluaran sektor kesehatan tahun 2013 adalah sebesar minus 0,95%.

Tahun 2014 jumlah pengeluaran di sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.090.269.775.225 bila dipersentasekan maka kenaikan pengeluaran sektor kesehatan tahun 2013 adalah sebesar 22,97%. Pada tahun 2015 jumlah pengeluaran di sektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2014 menjadi sebesar Rp 172.751.501.826 bila dipersentasekan maka penurunan pengeluaran di sektor kesehatan tahun 2015 adalah sebesar minus 84,16%.

Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada pengeluaran di bidang kesehatan. Tahun 2016 jumlah pengeluaran disektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami kenaikan menjadi Rp 1.441.274.499.220 atau sebesar

734,31% serta untuk tahun 2017 jumlah pengeluaran disektor kesehatan di Provinsi Aceh mengalami kenaikan menjadi Rp 1.811.622.160.009 atau 25,70%.

Perkembangan indeks pembangunan manusia dilakukan dengan cara mengukur capaian pembangunan manusia yaitu masyarakat di Provinsi Aceh berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang, sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dan dapat terlihat pada Tabel 4. berikut ini.

**Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2007-2017**

No	Tahun	IPM (%)	Perkembangan (%)
1	2007	70,40	-
2	2008	70,86	0,66
3	2009	71,29	0,62
4	2010	67,09	-5,90
5	2011	67,45	0,54
6	2012	67,81	0,53
7	2013	68,30	0,72
8	2014	68,81	0,75
9	2015	69,45	0,93
10	2016	70,00	0,79
11	2017	70,60	0,86

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui perkembangan indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh dari tahun 2007-2017. Pada tahun 2007 indeks pembangunan manusia sebesar 70,40% yang artinya pada tahun 2007 dari dimensi adanya kesehatan dengan melihat umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak baru mencapai 70,40%. Pada tahun 2008 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh meningkat dari tahun sebelumnya hanya sebesar 0,66%, atau menjadi sebesar 70,86%, sehingga pada tahun 2008 terjadi

peningkatan kesehatan, adanya pendidikan yang cukup serta peningkatan kehidupan yang layak. Pada tahun 2009 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh sebesar 71,29% dan terjadi peningkatan sebesar 0,62%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kesehatan, pendidikan, dan pendapatan sudah mengalami perbaikan. Pada tahun 2010 indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh sebesar 67,09% atau menurun dari tahun 2009 sebesar -5,90%, angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan yang layak mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2010 pengeluaran di sektor pendidikan mengalami penurunan dan hal ini berdampak pada penurunan indeks pembangunan manusia. Disamping itu, pada tahun 2011 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 67,45% atau mengalami peningkatan sebesar 0,54%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2012 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 67,81% atau mengalami peningkatan sebesar 0,53%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 68,30% atau mengalami peningkatan sebesar 0,72%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 68,81% atau mengalami peningkatan sebesar 0,75%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 69,45% atau mengalami peningkatan sebesar 0,93%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 70,00% atau mengalami peningkatan sebesar 0,79%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2017 indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh adalah sebesar 70,60% atau mengalami peningkatan sebesar 0,86%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kehidupan layak di Provinsi Aceh mengalami perbaikan. Dari segi pengaruh pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh dapat diketahui dari data yang

dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program Eviews dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Dengan Eviews**

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	23,50261	10,69822	2,196875	0,0494
X2	43,22175	13,60400	3,177134	0,0131
C	66,9530	6,83263	9,799040	0,0030
R-squared	0,576079	Mean dependent var		63,82395
Adjusted R-squared	0,470098	S.D. dependent var		14,51968
S.E. of regression	10,56950	Akaike info criterion		7,780824
Sum squared resid	893,7155	Schwarz criterion		7,889341
Log likelihood	-39,79453	Hannan-Quinn criter.		7,712419
F-statistic	5,435710	Durbin-Watson stat		1,253094
Prob(F-statistic)	0,032295			

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 5. maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 66,9530 + 23,50261X_1 + 43,22175X_2 \quad (2)$$

Dari hasil persamaan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 66,9530 menunjukkan bahwa jika pengeluaran sektor pendidikan dan pengeluaran sektor kesehatan bernilai tetap, maka indeks pembangunan manusia sebesar 66,9530 persen.
2. Koefisien regresi  $b_1$  sebesar 23,50261, yang menyatakan bahwa pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dan bila pengeluaran sektor pendidikan meningkat 1% maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 23,50261% dengan asumsi variabel pengeluaran sektor kesehatan tetap.
3. Koefisien regresi  $b_2$  sebesar 43,22175, yang menyatakan bahwa pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dan bila pengeluaran sektor kesehatan meningkat 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 43,22175% dengan asumsi variabel pengeluaran sektor pendidikan tetap.

Selanjutnya dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,576 atau sebesar 57,6% variabel pengeluaran sektor pendidikan dan variabel pengeluaran sektor kesehatan memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan sisanya sebesar 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji statistik (uji t atau uji parsial) dan uji F atau uji secara simultan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai prob pada Tabel 5. dan nilai  $\alpha$  5% (0,05), hasil uji sebagai berikut:

Pada variabel pengeluaran sektor pendidikan nilai Prob  $< \alpha$  5% (0,0494 < 0,05) dapat dinyatakan bahwa pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh dan hipotesis pertama diterima. Pada variabel pengeluaran sektor kesehatan nilai Prob  $< \alpha$  5% (0,0131 < 0,05) dapat dinyatakan bahwa pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh, dan hipotesis pertama diterima.

Selain uji t dapat juga diketahui uji F atau uji secara simultan dengan membandingkan nilai prob (F Statistik) sebesar 0,0322 dan  $\alpha$  5%. Berdasarkan angka tersebut maka dapat diketahui nilai prob (F statistik)  $< \alpha$  5% (0,0332 < 0,05) dapat dinyatakan bahwa secara simultan pengeluaran sektor pendidikan dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh dan hipotesis kedua dapat diterima.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: (1) berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda diperoleh  $Y = 66,9530 + 23,50261X_1 + 43,22175X_2$ , (2) hasil uji koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,576 atau 57,6% variabel pengeluaran sektor pendidikan dan variabel pengeluaran sektor kesehatan memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, (3) hasil uji t dinyatakan secara parsial pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan (4) hasil uji F dinyatakan bahwa secara simultan pengeluaran sektor pendidikan dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan yaitu: agar pemerintah Provinsi Aceh meningkatkan pengeluaran sektor pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah-sekolah daerah pedalaman. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Aceh tetap perlu meningkatkan pengeluaran sektor kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan.

Diharapkan dengan peningkatan dalam dua sektor tersebut maka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Aceh di masa depan.

## REFERENSI

- BPS. (2010). *Indeks Pembangunan Manusia*. Aceh.
- Dian, Sylviani Parung. (2012). Analisis Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Feriyanto. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Hidayat. (2010). Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan Era Otonomi Daerah Periode 2000-2008. *Jurnal Perencanaan dan pengembangan Wilayah*. 2 (1), 28-40.
- Laisina dkk, (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15 (04), 193-208.
- Mahulauw, Abdul Kadir, Sansosa, Dwi Budi dan Mahardika, Putu. (2016). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan serta Insfrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 14 (02), 122-148.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maryani. (2010). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. 5 (1), Januari, 1-22.
- Priambodo. (2015). Pengklasteran Pemerintah Daerah untuk Memaksimalkan Kondisi Keuangan. *Jurnal Ekonomi*. 3 (1), 1-12.
- Sanggalorang, Septiana MM, Vekie A. Rumate dan Hanly F. DJ Siwu. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15 (2), 1-11.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Pendidikan.
- Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Winarti. A. (2014). Analisis Pengaruh Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992 –2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widodo dkk, (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1 (1), 25-42.